

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA

Unit Kerja/Perangkat Daerah
Triwulan/Tahun Anggaran

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB
IV (Empat) TA. 2021

A.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Fisik (%)
		Uraian	Satuan	Target	Realisasi	%		(Rp)	Realisasi	%	
1	Menurunnya perda/perkada yang dilanggar oleh masyarakat	Persentase perda/perkada yang dilanggar	%	20.00	18.92	94.59					
2	Terwujudnya wilayah bebas gangguan tibumtranmas	Persentase wilayah bebas gangguan tibumtranmas	%	60.68	53.85	88.74					
3	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas	Persentase peningkatan Anggota Satlinmas dengan nilai evaluasi ≥Baik	%	2.56	2.56	100					
							PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2,661,636,800	2,165,979,550	81.38	81.38
							Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1,301,036,100	1,417,612,050	108.96	108.96
							Perencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	447,976,700	584,335,450	130	130

						Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	252,300,000	249,792,000	99.01	99.01
						Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat <u>Tingkat Provinsi</u>	71,914,300	62,212,000	87	87
						Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	169,680,100	194,137,000	114	114
						Peningkatan Kapasitas SOM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	257,232,400	284,221,000	110	110
						Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan <u>Kelahatan</u>	49,927,100	42,914,600	86	86
						Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum			-	-
						Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat			-	-
						Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	52,005,500	-	-	-
						Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	1,195,874,200	743,005,300	62.13	62.13
						Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	350,201,200	175,832,700	50	50

						Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	645,673,100	525,333,600	81.36	81.36
						Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	199,999,900	41,839,000	21	21
						Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	164,726,500	5,362,200	3.26	3.26
						Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	114,726,700	-	-	-
						Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	49,999,800	5,362,200	11	11

B. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET

No	UPAYA YANG DILAKUKAN
1	Membentuk Tim Terpadu Lintas SKPD dengan Keputusan Gubernur, yaitu :
a	Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan, Pencegahan dan Pembentukan Cukai Rokok/Tembakau Ilegal di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, keanggota lintas sektor (Gubernur NTB, Wakil Gubernur NTB, Sekretaris Daerah Prov. NTB, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Prov. NTB, Kasat Pol PP Prov. NTB dan staf, Kepala Bappeda Prov. NTB dan staf, Kepala Bakesbangpoldagri Prov. NTB, Kepala Biro Hukum Setda Prov. NTB dan staf, Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Direktur Ops Polda NTB Kabid. Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Kasubsi. Penyelidikan dan Barang Hasil Penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram)
2	Membuat Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat tentang Penyelenggaraan Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat
3	Menggelar Operasi Gabungan (OPGAB) :
a	OPGAB dalam rangka pencegahan penyakit masyarakat secara berkala dan situasional
b	OPGAB dalam rangka Penanggulangan Penyakit Menular (COVID-19)
4	Meningkatkan pembinaan dalam rangka pemahaman tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja melalui rapat internal
5	Meningkatkan pembinaan disiplin seluruh anggota dan jajaran struktural, serta memberikan penghargaan (<i>reward</i>) dan sanksi (<i>punishment</i>)

C. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET

No	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN PERMASALAHAN	UPAYA KEDEPAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA SKPD
	Kesadaran, kepatuhan serta partisipasi masyarakat, aparatur dan badan hukum dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah yang masih kurang	Membentuk satuan tugas (SATGAS) penyelenggaraan tbumtranimas yang beranggotakan para Kasat POLPP Kab/Kota se NTB dan Polri serta POLPP Provinsi NTB	Membentuk pengamanan lingkungan binaan dengan fasilitas POLPP Provinsi NTB Memfasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi PPNs Lingkup Prov. NTB Mengembangkan SMS Pengaduan Pelanggaran Perda dan Ketertiban Umum melalui NTB Care Memfasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi PPNs Lingkungan Prov. NTB
	Sarana prasarana penunjang tugas lapangan masih belum memadai akibat pelaksanaan tugas belum optimal dan personil sering dihadapkan pada resiko tugas yang tinggi	Melakukan koordinasi dengan yang intensif dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota, organisasi kemasyarakatan dan instansi terkait Berupaya secara bertahap memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana	Mengusulkan penambahan rencana alokasi anggaran peningkatan sarana dan prasarana penunjang tugas pada kesempatan reuvis dan revisi RPJMD
	Kualitas dan kuantitas SDM POLPP masih belum memadai khususnya dalam menjangkau cakupan wilayah tugas Provinsi NTB	Melakukan sinergitas dengan POLPP Kab/Kota se NTB Mendorong dan memfasilitasi anggota POLPP menjadi tenaga fungsional POLPP Melibatkan anggota POLPP dalam kegiatan yang memfasilitasi pengembangan diri (Diklat, Bimtek dll)	Mengusulkan penambahan jumlah anggota POLPP sesuai Permendagri No. 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah POLPP Sebanyak Paling Sedikit menjadi 300 orang dari 141 orang dengan Provorsi kelompok umur dibawah 40 tahun,

D. INFORMASI LAIN TERKAIT PRESTASI SKPD ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH BAIK TINGKAT NASIONAL/INTERNASIONAL BESERTA JENIS PENGHARGAAN YANG DITERIMA

- NIHIL -

